

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan memberikan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat. UMKM dapat berperan dalam proses pemerintahan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas nasional.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pasal 1 halaman 2 dari Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM tersebut sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang UMKM tersebut.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang UMKM tersebut.
3. usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang UMKM tersebut.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada pasal 6 halaman 5 terdapat kriteria entitas mikro kecil dan menengah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro, memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil, memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah, memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan definisi mengenai pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka penulis dapat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

## **2.2 Akuntansi**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi pada hakikatnya suatu proses pengidentifikasian, penggolongan, pengikhtisaran, pencatatan dan penyajian informasi ekonomi mengenai atas transaksi keuangan yang terjadi selama periode waktu tertentu serta menginterpretasikan dari hasilnya. Menurut Hery (2021:2) Akuntansi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak (stakeholder) yang berkepentingan dengan hasil kinerja dan terhadap hasil kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan.

Sedangkan menurut Bahri (2020:1) Akuntansi (*accounting*) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan serta dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif dalam bidang ekonomi.

Menurut Christy (2020:1) akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan atau pengikhtisaran dan pelaporan yang disajikan dalam laporan keuangan yang menyediakan informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Sastroatmodjo dan Purnairawan (2021:1) akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang disajikan secara sistematis dan kronologis dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.

Berdasarkan definisi di atas dari para ahli dinyatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak kepentingan. Jenis akuntansi ini juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau berbagai tindakan alternatif dalam bidang ekonomi.

### **2.2.2 Pengertian Akuntansi Keuangan**

Akuntansi keuangan suatu sistem yang mengatur pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan suatu perusahaan dan menyusun laporan keuangan tentang transaksi yang terjadi. Menurut Bahri (2020:4) “Akuntansi keuangan berkaitan dengan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan secara periodik dengan standar akuntansi keuangan”.

Menurut Hanggara (2019:3) akuntansi keuangan (*financial accounting*) diartikan sebagai bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan segala kegiatan *financial* yang berhubungan dengan akuntansi atau secara khusus menangani pencatatan perekonomian pada umumnya secara seperti pencatatan transaksi keuangan hingga penyajian data yang telah menjadi bentuk laporan keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Ardianto (2019:16) “Akuntansi keuangan adalah praktik akuntansi keseluruhan suatu unit ekonomi”.

Berdasarkan definisi diatas dari para ahli mengenai pengertian akuntansi keuangan, maka penulis dapat bahwa akuntansi keuangan adalah kegiatan pencatatan akuntansi seperti pencatatan transaksi keuangan ke dalam pelaporan keuangan sesuai dengan berpedoman pada standar akuntan keuangan.

### **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 Tahun 2018**

Secara umum, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang harus diikuti dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) tentang persediaan. PSAK tersebut juga memuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh akuntan agar dapat menghasilkan laporan akuntansi yang lebih baik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018 : 14.1) dalam PSAK No. 14 menjelaskan bahwa :

- a. Persediaan dalam PSAK No. 14, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengkhususkan pernyataan mengenai persediaan. Ini terdiri dari bagian pendahuluan, penjelasan dan mengungkapkan mengenai persediaan barang dagangan.
- b. Pendahuluan dalam pendahuluan PSAK No. 14 memuat tentang tujuan pernyataan ruang lingkup pernyataan dan definisi persediaan. Pendahuluan ini terdiri dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 8.
- c. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan yang bersangkutan diakui.
- d. Ruang lingkup dalam paragraf 2 PSAK No. 14 mengatakan bahwa : pernyataan ini harus diaplikasikan untuk seluruh persediaan, kecuali :
  1. Pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait langsung ( lihat PSAK 34: Kontrak Kontruksi).
  2. Instrumen Keuangan ( lihat PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran ).
  3. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik panen. ( lihat PSAK 69: Agrikultur ).

Berdasarkan definisi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14, maka penulis dapat bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 adalah salah satu standar yang dibuat untuk mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan yang bertujuan untuk memudahkan

perusahaan dagang dalam melakukan pencatatan, penilaian persediaan, pengukuran, pengakuan terhadap persediaan perusahaan dagang.

#### **2.4. Persediaan**

Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan tersedia dijual untuk tujuan komersial atau yang akan digunakan untuk menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Maka persediaan suatu aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena sumber utamanya dalam mencapai keuntungan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018:14.2) persediaan adalah aset:

- a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
- b. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Vikaliana, dkk (2020:2) Persediaan adalah salah satu aset operasional perusahaan yang diperoleh secara terus menerus kemudian dijual kembali, dimaksudkan untuk dapat memperlancar kegiatan produksi/pelayanan. Menurut Sumiyati & Nafi'ah (2019:142) "Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan akan dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam proses produksi untuk dijual kembali atau untuk penggantian suku cadang peralatan atau mesin". Menurut Warren *et al.*, (2017:343), "Persediaan adalah barang dagang yang cocok disimpan untuk kemudian dijual kembali dalam kegiatan operasi bisnis perusahaan atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu".

Menurut Kieso *et al.*, (2017:499), "Persediaan adalah suatu barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang untuk dijual". Sedangkan Anwar (2019:90) "Persediaan adalah barang yang disimpan dan disediakan oleh perusahaan untuk dapat digunakan dalam proses produksi, maupun untuk dijual ke konsumen".

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat bahwa persediaan adalah suatu barang yang disimpan untuk dipakai lebih lanjut atau dijual selama jangka waktu tertentu tergantung pada permintaan yang ada atau akan dijual pada periode mendatang. Persediaan terdiri atas persediaan barang baku, persediaan

barang dalam setengah proses produksi, sedangkan persediaan jadi atau barang dagangan disimpan sebelum dijual atau dipasarkan.

## 2.5 Jenis-Jenis Persediaan

Jenis persediaan yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak selalu sama, persediaan dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis perusahaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:14.2), “Persediaan juga mencakup barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi”. Sedangkan Menurut Arifin (2018:38) mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Persediaan barang baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok serta tingkat efisiensi penjualan pembelian kegiatan produksi .
2. Persediaan dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi.
3. Persediaan bahan jadi merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan.

Sedangkan menurut Dewi, dkk (2017:128) “Persediaan di perusahaan dagang hanya diklasifikasikan sebagai persediaan barang dagang (*merchandise inventory*) sedangkan di perusahaan manufaktur persediaan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu persediaan barang jadi (*finished goods*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan bahan baku (*materials*)”.

Menurut Warren *et al.*, (2017:343), persediaan pada setiap perusahaan berbeda dengan kegiatan bisnisnya. Persediaan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Persediaan barang baku, barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain (misalnya dengan menabung) dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali.
2. Persediaan barang dalam proses barang yang telah diproses namun masih membutuhkan pekerjaan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan bahan dalam proses, pada umumnya dinilai jumlah harga pokok bahan

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu.

3. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang telah diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. Produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.
4. Persediaan barang penolong meliputi semua barang yang dimiliki untuk keperluan produksi, tetapi tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi.

Berdasarkan definisi ahli di atas, maka penulis dapat bahwa pada dasarnya jenis-jenis persediaan adalah persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Perusahaan dagang menggunakan jenis stok barang jadi yang diperoleh dengan cara dibeli dengan tujuan dijual kembali tanpa dengan memodifikasi bentuk fisik barang dagangan tersebut.

## **2.6 Biaya Persediaan**

Biaya persediaan semua biaya yang dianggap sebagai aset dalam neraca pada saat terjadinya dan kemudian menjadi harga pokok penjualan ketika produk tersebut dijual. Menhasilkan keuntungan dalam suatu perusahaan sangatlah penting, mengapa perusahaan harus memperhatikan perhitungan biaya persediaan dan pemesanan dengan cara meminimalkan biaya persediaan dan pemesanan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:14.2), “ Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini”.

Menurut Pangestika (2020:124) Biaya persediaan merupakan biaya yang muncul diakibatkan adanya produk. Sedangkan menurut Eunike (2021:32) biaya persediaan yang dianalisis adalah terkait tiga hal antara lain :

1. Biaya pemesanan atau biaya set up  
Biaya pemesanan dan biaya set up adalah biaya yang dikeluarkan ketika dilakukan pemesanan suatu produk atau set up untuk memulai produksi. Dalam hal ini termasuk biaya administrasi yang berhubungan dengan pemesana dan set up contohnya adalah pembelian kertas, biaya transportasi untuk mengirim barang dari supplier ke perusahaan.

2. Biaya penyimpanan

Pengelolaan penyimpanan akan berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk jumlah barang, lama penyimpanan, dan nilai dari barang yang disimpan. Dengan modal yang dialokasikan ke persediaan perusahaan melakukan pengorbanan pada kesempatan untuk melakukan investasi pada bidang yang lain seperti mesin baru, Gedung baru, pengembangan produk baru, dan lain sebagainya.

3. Biaya ketika terjadi kekurangan.

Biaya ini muncul ketika permintaan lebih banyak dari ketersediaan produk yang disimpan. Biaya ini lebih sulit untuk diukur dari pada biaya pesan dan biaya penyimpanan. Pada beberapa kasus biaya kekurangan mungkin sama dengan kerugian yang dimunculkan ketika pelanggan dapat membeli produk pada perusahaan pesaing (kehilangan potensi keuntungan).

Berdasarkan definisi ahli diatas, maka penulis dapat bahwa pada dasarnya biaya yang dalam persediaan adalah biaya-biaya yang timbul dalam persediaan terdiri dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya ketika terjadi kekurangan persediaan hingga persediaan tersebut berada dalam lokasi dan kondisi saat ini .

## 2.7 Metode Pencatatan Persediaan

Metode pencatatan persediaan terdiri dari dua metode pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan dalam pencatatannya, dalam melakukan pencatatan persediaan perusahaan biasanya menggunakan salah satu metode yang ada. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:14.6) “Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya penadapatan atas penjualan tersebut”. Menurut Kieso *et al.*, (2017:370) ada dua metode sistem pencatatan persediaan barang dagang yaitu :

1. Metode Pencatatan Perpetual

Dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, atau retur penjualan. Dalam sistem ini setiap pembelian akan dijurnal dalam akun persediaan barang dagangan, penjualan akan dijurnal pada akun penjualan dan harga pokok penjualan juga dijurnal. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo rekening persediaan. Nilai persediaan akhir dapat diketahui tapi perhitungan fisik

tetap harus dilakukan untuk mencocokkan persediaan akhir menurut perhitungan fisik dengan catatan akuntansi. Fitur akuntansi sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku untuk diproduksi di debit ke persediaan bukan ke pembelian.
- b. Biaya angkut di debit ke persediaan, bukan ke pembelian. Retur dan penyisihan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke persediaan bukan ke akun terpisah.
- c. Beban Pokok Penjualan dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit Beban Pokok Penjualan dan mengkredit persediaan.
- d. Buku besar pembantu catatan persediaan individual dipertahankan sebagai pengukuran pengendalian. Catatan buku besar pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada.

## 2. Metode Fisik/Periodik

Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku, setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Dengan metode periodik, maka akun-akun seperti retur pembelian, potongan pembelian dan biaya angkut masuk digunakan secara terpisah, sedangkan pada metode perpetual untuk menentukan harga pokok penjualan tidak mengenal akun-akun tersebut, namun menggantinya dengan akun persediaan. Perhitungan fisik (*stock opname*) pada saat akhir periode mutlak harus dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan metode pencatatan periodik. Hal ini harus dilakukan agar dapat mengetahui dan menetapkan jumlah persediaan barang dagangan akhir dan harga pokok penjualan selama satu periode.

Menurut Harnovinsah, dkk (2023:180) metode pencatatan persediaan diantaranya sebagai berikut :

### 1. Metode Periodik

Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut sebagai metode 'fisik' karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Metode periodik atau fisik ini lebih cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula.

## 2. Metode Perpetual

Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat bahwa metode pencatatan persediaan terdapat menjadi dua metode yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik yaitu melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode agar dapat mengetahui dan menetapkan jumlah persediaan dan harga pokok penjualan selama setiap akhir periode. Metode perpetual yaitu perhitungan fisik persediaan yang melakukan mencatat stok persediaan barang yang masuk dan keluar secara rinci yang akan dicatat dalam kartu persediaan sehingga memudahkan untuk mengetahui nilai persediaan akhir setiap saat.

### 2.8 Metode Penilaian Persediaan

Disetiap akhir periode akuntansi total persediaan dialokasikan pada laporan keuangan, dimana metode penilaian persediaan pada suatu perusahaan bertujuan untuk menentukan saldo akhir persediaan dan harga pokok penjualan dalam sebuah perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018:14.5), “Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 22, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang”. Menurut Kieso *et al.*, (2017: 515-517) ada tiga metode penilaian persediaan barang dagang yaitu :

#### 1. Identifikasi khusus (*Specific Identification*)

Metode identifikasi khusus dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap item yang dijual dan setiap item yang masih dalam persediaan. Perusahaan memasukkan biaya dari barang tertentu yang terjual ke dalam beban pokok penjualan. Perusahaan memasukkan biaya dari item tertentu yang masih ada ke dalam persediaan. Metode ini tampak ideal dikarenakan identifikasi khusus mengaitkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Oleh karena itu perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual atau berdasarkan metode identifikasi khusus arus biaya berkaitan dengan arus fisik barang.

## 2. Metode Biaya Rata-Rata (*Average Cost Method*)

Metode biaya rata-rata memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Metode biaya rata-rata ini terbagi menjadi dua metode yaitu metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*) dan metode rata-rata bergerak (*moving-average method*). Dalam metode biaya rata-rata tertimbang barang-barang yang dipakai untuk produksi atau dijual akan dibebani dengan biaya rata-rata. Perhitungan biaya rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Sedangkan dalam metode biaya rata-rata bergerak dihitung dengan menghitung biaya rata-rata per unit baru setiap kali melakukan pembelian.

## 3. First In First Out (FIFO)

Metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan (pada perusahaan manufaktur) atau yang pertama dijual (pada perusahaan dagang). Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mencerminkan pembelian terbaru. Dalam metode FIFO persediaan dan beban pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, baik menggunakan sistem perpetual maupun periodik. Hal ini dikarenakan biaya yang sama akan selalu menjadi yang pertama masuk dan karena itu pertama yang keluar. Keuntungan dari metode FIFO ini dapat mencegah manipulasi laba karena dengan FIFO perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk menggunakan beban.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat bahwa persediaan terdapat beberapa metode penilaian persediaan yaitu metode identifikasi khusus (*Specific Identification*), metode *first in first out* (FIFO), metode biaya rata-rata (*Average Cost Method*) metode penilaian persediaan akan menghasilkan nilai harga pokok penjualan dan persediaan akhir yang berbeda-beda pada laporan keuangan. Penggunaan metode penilaian persediaan ini tergantung pada kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan.

## 2.9 Perbandingan Metode Biaya Persediaan

Menurut Warren *et al.*, (2017:354) menyatakan bahwa untuk metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Kedua metode tersebut biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk :

1. Beban pokok penjualan
2. Laba bruto

3. Laba netto
4. Persediaan akhir

Perbedaan-perbedaan di atas tersebut menunjukkan akibat dari adanya kenaikan biaya (harga). Jika biaya (harga) tetap sama, kedua metode akan memberikan hasil yang sama. Namun demikian, biaya (harga) terus berubah. Efek dari perubahan biaya (harga) pada metode FIFO dan rata-rata tertimbang.

**Tabel 2.1**

**Pengaruh dari Perubahan Biaya (Harga): Metode Biaya FIFO dan Rata-rata Tertimbang (WA)**

	+ Peningkatan Biaya (Harga)		-Penurunan Biaya (Harga)	
	↑ Jumlah Tertinggi	↓ Jumlah Terendah	↑ Jumlah Tertinggi	↓ Jumlah Terendah
Beban pokok penjualan	WA	FIFO	WA	FIFO
Laba bruto	FIFO	WA	WA	FIFO
Laba netto	FIFO	WA	WA	FIFO
Persediaan akhir barang	FIFO	WA	WA	FIFO

*Sumber : Pengantar Akuntansi 1, Warren, dkk ( 2017:355)*

Berdasarkan tabel di atas, pada saat ada peningkatan harga, FIFO menghasilkan laba bruto dan laba netto yang lebih tinggi dari pada metode rata-rata tertimbang, tetapi dalam periode di mana biaya naik secara cepat, persediaan yang terjual harus diganti dengan biaya yang semakin tinggi. Dalam keadaan seperti ini, laba bruto dan laba netto FIFO yang lebih besar disebut laba persediaan (*Inventory profits*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat bahwa pengaruh perubahan biaya (harga) perolehan itu sangat penting. Dalam peningkatan atau penurunan biaya (harga) perolehan baik menggunakan metode FIFO maupun metode rata-rata tertimbang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah beban pokok penjualan, laba bruto, laba netto dan persediaan akhir.